

PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL: STRATEGI ANTISIPASI KRISIS PANGAN INDONESIA

THE DEVELOPMENT OF NATIONAL FOOD ESTATE : THE INDONESIAN FOOD CRISIS ANTICIPATION STRATEGY

Lula Lasminingrat¹ dan Efriza²

UPN Veteran Jakarta & Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
(lula.lasminingrat@gmail.com dan efriza.riza@gmail.com)

Abstrak – Indonesia merespons urgensi ancaman krisis pangan yang melanda dengan strategi pembangunan lumbung pangan nasional. Menurut laporan yang dirilis oleh FAO dan PBB, wabah pandemi Covid-19 berpotensi mengancam 50 juta orang lebih menuju kemiskinan ekstrim. Hal ini berdampak pada krisis pangan global yang mengancam negara-negara di dunia jika tidak segera mengambil langkah tepat. Krisis pangan merupakan salah satu ancaman non-tradisional karena berdampak signifikan terhadap hajat hidup banyak orang dalam suatu negara. Ancaman non-tradisional diartikan sebagai ancaman keamanan yang melanda suatu negara secara non-militer, hal itu dapat berupa isu perubahan iklim, ekonomi, keterbatasan sumber daya, wabah penyakit, atau keamanan pangan. Keamanan pangan dapat dicapai ketika akses pangan dapat dijangkau dengan mudah oleh segala elemen masyarakat dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kendati demikian, ketika akses pangan tidak dapat di akses masyarakat hal ini menimbulkan potensi krisis pangan. Hal ini mengingat pangan merupakan kebutuhan primer setiap individu yang harus dipenuhi setiap saat sehingga merupakan isu keamanan nasional. Melalui permasalahan tersebut, keamanan pangan nasional harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang tinggi dan wabah pandemi, keamanan dan stabilitas pangan nasional berada diambang keterbatasan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pembangunan *food estate* sebagai strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan dalam beberapa tahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami urgensi pembangunan *food estate* sebagai cara Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan dengan menggunakan teori ancaman, ketahanan pangan, dan *food estate*. Dalam hal ini, ancaman krisis pangan direspons oleh Jokowi dengan pembangunan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Pembangunan lumbung pangan nasional dinilai dapat memenuhi cadangan pangan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, terutama setelah masa pandemi. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat potensi krisis pangan sebagai ancaman nasional sehingga diperlukan langkah-langkah terukur yang mampu mengatasi permasalahan tersebut serta memperhatikan adanya aspek keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembangunan *food estate* merupakan langkah yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut.

Kata Kunci: ancaman non-tradisional, krisis pangan, keamanan pangan, *food estate*, keamanan nasional

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta (UPN Veteran Jakarta).

² Dosen Program Studi Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN).

Abstract – Indonesia responds to the urgency of the threat of food crisis by developing national food estate. According to reports released by FAO and United Nations, the Covid-19 pandemic has the potential to threaten more than 50 million people towards extreme poverty. This has an impact on the global food crisis that threatens other countries if they do not take the right steps immediately. Food crisis is one of the non-traditional threats because it has significant impact on lives of many people in a country. Non-traditional threats are defined as security threats that hit a country non-militarily, it can be in the form of issues of climate change, economy, limited resources, disease outbreaks, or food security. Food security can be achieved when access to food can be easily achieved by all elements of society and meets the domestic needs. However, when access to food cannot be easily accessed by public, it creates a potential for a food crisis. This is because food is the primary need of every individual which must be fulfilled at any time so it is a national security issue. Through these problems, the availability of national food security must be guaranteed by the government. Along with high population growth and a pandemic outbreak, national food security and stability is on the verge of limitations. This article aims to explain the development of food estate as Indonesia's strategy in facing the threat of food crisis in the next few years. This research used qualitative analysis method to understand the urgency of the development of food estate as a way for Indonesia to face the threat of food crisis by using the theory of threats, food security, and food estate. In this case, Jokowi responded to the threat of the food crisis by building national food estate in Central Kalimantan. The development of national food estate is considered to be able to meet Indonesia's food reserves in the next few years, especially after the pandemic period. The results of the research in this article show that the government sees the potential for the food crisis as a national threat, so it needs measurable steps that can overcome these problems and pay attention to the sustainability aspect in its implementation. Therefore, building a food estate is the right step to answer this challenge.

Keywords: non-traditional threat, food crises, food security, food estate, national security

Pendahuluan

Krisis pangan diperkirakan akan melanda dunia dalam 50 tahun ke depan. Hal ini disebabkan karena kondisi pasca pandemi Covid-19 serta perubahan iklim. Menurut laporan yang dirilis *Global Network Against Food Crisis* (GRFC) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada akhir 2019 lalu, setidaknya ada 135 juta orang di 55 negara mengalami krisis pangan akut. Hal ini menyebabkan 75 juta pertumbuhan anak terganggu dan 17 juta lainnya terdampak malnutrisi pada tahun 2019. Data yang dirilis ini menunjukkan angka tertinggi dampak krisis pangan dan malnutrisi sejak laporan pertama pada tahun 2017.³

³ FAO Reports, "Global Report on Food Crisis", (New York: Food Security Information Network, 2020), hlm. 2-11.

Dalam perilisan selanjutnya, Sekretaris Jendral PBB, António Guterres menyatakan bahwa saat ini masyarakat global berada di ambang krisis pangan akut selama setidaknya dalam 50 tahun ke depan. "Cukup jelas bahwa adanya keadaan darurat pangan global yang jika tidak segera diatasi, akan berdampak jangka panjang terhadap jutaan anak dan orang tua. Tindakan diperlukan sekarang untuk menghindari skenario terburuk dalam kondisi pandemi," papar António pada Juni 2020 lalu.⁴

Peringatan FAO akan ancaman krisis pangan di tahun-tahun mendatang mendapat perhatian yang cukup besar

⁴ Fiona Harvey, "World faces worst food crisis for at least 50 years: UN warns", dalam <https://www.theguardian.com/society/2020/jun/09/world-faces-worst-food-crisis-50-years-un-coronavirus>, 9 Juni 2020, diakses pada 16 September 2020.

dari Indonesia. Sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, Indonesia pun tidak terlepas dari ancaman krisis pangan global. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya jumlah penduduk, semakin tinggi tingkat kebutuhan konsumsi pangannya terutama bahan pokok seperti beras, singkong, dan sorgum. Selain sebagai negara tropis, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman perubahan iklim seperti musim kemarau yang panjang. Kedua kondisi ini dihadapkan dengan wabah pandemi Covid-19 yang tidak menentu sehingga mendorong nasib sektor pertanian tidak terkendali. Oleh karena itu, negara dituntut untuk melakukan tindakan nyata guna mempertahankan ketahanan pangannya ditengah kondisi ketidakpastian ini⁵

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sinyal merah akan keadaan darurat pangan yang mengancam. Presiden Jokowi resmi menunjuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai *'leading sector'* dalam proyek lumbung pangan nasional atau *'food estate'* pada 13 Juli 2020. Dalam pertemuannya dengan awak media, Jokowi juga menjelaskan posisi Kementerian Pertanian RI (Kemtan) yang dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo yang tetap berkontribusi dalam proyek *food estate* ini. Jokowi juga menegaskan bahwa program lumbung pangan

⁵ Alfin Febrian & Fadhil Haidar Sulaeman, "Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Lemhannas*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 28-42.

nasional yang diberi nama *'food estate'* ini merupakan respons dari potensi ancaman krisis pangan yang diberikan FAO.

Respons Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan dengan perencanaan pembangunan lumbung pangan nasional atau *food estate* sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya. Seperti halnya Mega Rice Project (MRP) di zaman Soeharto, Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) di zaman SBY, hingga (Merauke Kawasan Ekonomi Khusus/ Merauke KEK) di zaman Jokowi I. Kendati demikian, sebagian proyek tersebut tersendat bahkan dihapus dari proyek strategis nasional karena dinilai tidak mampu memenuhi ekspektasi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa proyek besar rentan menjadi proyek dengan *progress* yang lamban, sebab, didalamnya terlalu banyak perputaran dana serta perencanaan yang tidak matang sehingga *output* yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu tidak tercapai. Hal ini pun menjadi pertimbangan besar dan tantangan yang akan dihadapkan pada proyek *food estate*.

Indonesia merupakan negara agrikultur. Sektor agrikultur Indonesia menyumbang 14% total *Gross Domestic Product* (GDP) di tahun 2007. Indonesia juga dikenal sebagai negara produsen serta eksportir beras, kelapa sawit, kopi, karet, coklat, rempah-rempah (kayu manis, pala, cengkeh)⁶. Dalam perkembangannya,

⁶ Richard Barichello & Arianto Patunru, "Agriculture in Indonesia: Lagging Performance and Difficult Choices", *CHOICES*, (Agricultural & Applied Economics Associations, 2009).

situasi pandemi menyebabkan adanya urgensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menempati prioritas pemerintah disamping pembangunan ekonomi serta penanganan Covid-19. Sebagai negara agraris besar, Indonesia memiliki strategi untuk mengamankan ketahanan pangannya dengan melakukan pembangunan lumbung pangan nasional atau *food estate* di dua lokasi yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah sehingga secara bertahap akan diaplikasikan di provinsi lainnya. *Food estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dalam satu area tertentu, mencakup dari sisi perkebunan, pertanian, hingga peternakan. Hal yang membedakan adalah pelibatan teknologi digital serta prinsip keberlanjutan yang akan diterapkan selama pembangunan *food estate* tersebut.

Pembangunan *food estate* diperkirakan akan menyumbang sebagian besar kebutuhan pangan Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan di tahun mendatang. Krisis pangan merupakan salah satu ancaman yang dikhawatirkan, sebab, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan dampaknya berpotensi menyebar ke sektor vital lainnya. Hingga penelitian ini dilakukan, Kementan sangat menjamin ketersediaan cadangan pangan Indonesia yang dinilai cukup stabil. Kementan mengekspektasikan surplus 7,6 juta ton beras pada bulan Desember sehingga total cadangan beras mencapai 17,6 juta ton sementara tingkat konsumsi berada di

kisaran 10 juta ton⁷. Namun, Indonesia tidak bisa mengabaikan fakta kondisi global yang tidak pasti terutama pasca pandemi Covid-19 dan peringatan dari FAO. Proyek besar *food estate* dinilai cukup ambisius mengingat dana dan perencanaan yang dialokasikan cukup besar. Bahkan, *food estate* masuk sebagai salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024. Kendati demikian, permasalahan krisis pangan masih terus terjadi ketika kondisi produksi pangan yang tinggi namun sebagian besar populasinya masih kekurangan dan sulit mengakses makanan.

Melalui hal itu, penulis berupaya menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global yang dalam hal ini dilakukan dalam bentuk proyek pembangunan *food estate*. Penulis berusaha menemukan keunggulan dan kelemahan dalam inisiasi proyek yang cukup ambisius tersebut.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan paradigma interpretatif karena bertujuan untuk memahami suatu peristiwa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami urgensi strategi pemerintah Indonesia dalam membangun

⁷ Dzulfiqar Fathur Rahman, "Indonesia to develop food barns to secure rice stocks", dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/16/govt-to-develop-food-barns-facilitate-collaboration-to-secure-rice-stocks.html>, 16 November 2020, diakses pada 23 November 2020.

food estate sebagai respons dari ancaman krisis pangan.

Krisis pangan dinilai akan sangat merugikan Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi karena berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta masalah kesehatan atau malnutrisi bagi anak dan orang dewasa. Penelitian ini berusaha melihat krisis pangan sebagai ancaman non-tradisional yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Ancaman ini dinilai sangat merugikan karena berdampak langsung ke sektor-sektor vital Indonesia. Ancaman ini juga dinilai sangat nyata ketika mempertimbangkan situasi kondisi global saat ini yang sedang dilanda wabah pandemi Covid-19. Penelitian ini juga mempertimbangkan ketergantungan Indonesia terhadap sektor impor sehingga produksi lokal dalam bidang pertanian sulit bersaing. Tanpa adanya keterlibatan langsung pemerintah dalam mengatasi ancaman ini, Indonesia berpotensi akan masuk dalam jurang resesi dalam beberapa tahun ke depan sehingga langkah *food estate* dinilai merupakan strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa serta menjelaskan sebab-akibatnya. Suatu penelitian disebut eksplanatif untuk menjelaskan 'bagaimana' dan 'mengapa' dalam suatu fenomena sosial atau program tertentu

dan beroperasi dalam konteks tertentu⁸. Penelitian ini berbentuk eksplanatif karena bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global yang dalam hal ini dilakukan dalam bentuk proyek pembangunan *food estate* dan mengapa keberadaannya penting dalam usaha sebuah negara menghadapi ancaman krisis pangan. Penelitian eksplanatif juga ditujukan untuk melihat pola interaksi yang terbentuk dari suatu peristiwa sehingga bisa dilihat sebab-akibatnya.

Penelitian diawali dengan pengumpulan sumber (*heuristik*). Sumber penelitian ini berjenis studi pustaka (*library research*) yang diperoleh dari buku, jurnal, website, serta laporan yang relevan dengan kajian penelitian. Guna memperoleh sumber penelitian tersebut, peneliti melakukan kunjungan dan telaah dari berbagai laporan ataupun situs resmi yang dapat diakses secara *daring*.

Sumber data berasal dari laporan FAO tentang adanya ancaman krisis pangan berdasarkan pertimbangan data di tahun 2019 yang menyatakan setidaknya ada 55 negara mengalami krisis pangan akut/serius. Penelitian dan perkembangan laporan dari FAO mengindikasikan adanya potensi Indonesia dalam mengatasi permasalahan keamanan pangan dan gizi buruk. Kemudian, penelitian lebih lanjut dilakukan untuk menganalisis

⁸ Haradhan Kumar Mohajan, "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects", *Journal of Economic Development: Environment and People*, Vol. 7, Iss. 01, 2018, hlm. 23-48.

kondisi kekuatan agrikultur Indonesia saat ini yang memiliki perubahan akibat kondisi ekonomi dan perubahan kondisi global. Setelah itu, penelitian dilakukan untuk menganalisis keberadaan *food estate* dalam Program Strategis Nasional 2020-2024 sebagai respons pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis pangan setelah masa pandemi serta mengaitkannya dengan posisi Indonesia saat ini.

Pemahaman tentang ancaman krisis pangan dapat diidentifikasi sebagai ancaman non-tradisional. Ancaman non-tradisional diartikan sebagai ancaman non-militer yang mengancam integritas politik dan sosial negara-bangsa atau kesehatan penghuninya. Penelitian ini merupakan bentuk eksplanatif karena berusaha menggambarkan fenomena krisis pangan sebagai ancaman non-tradisional. Penulis berargumen bahwa permasalahan krisis pangan sangat merugikan Indonesia dan berdampak langsung pada sektor-sektor vital lainnya. Indonesia membutuhkan langkah cepat dalam mengatasi ancaman ini di tengah situasi ketidakpastian global. Hal tersebut juga tidak bisa melepaskan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Besarnya jumlah penduduk diartikan sebagai tingginya kebutuhan akan kebutuhan primer yang salah satunya adalah pangan. Fenomena inilah yang kemudian direspons pemerintah dengan rangkaian kebijakan baru dalam membangun *food estate*. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi ancaman

krisis pangan yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun ke depan serta mengamankan sektor pangan nasional serta penting untuk memahami urgensi ancaman krisis pangan yang disampaikan FAO.

Pembahasan

Krisis pangan merupakan sebuah ancaman bagi keamanan nasional suatu negara. Isu keamanan nasional terdiri dari ancaman tradisional dan non-tradisional. Isu keamanan tradisional membahas tentang ancaman terhadap nilai esensi dari sebuah negara, integritas teritorial, serta kedaulatan. Untuk mencapai hal itu, keamanan tradisional identik dengan usaha negara dengan menggunakan sistem persenjataan dan militer. Namun, di sisi lain dapat menggunakan cara yang lebih diplomatis seperti membangun aliansi dalam mencapai keamanan nasionalnya.⁹

Sementara itu, ancaman non-tradisional tradisional (*non-traditional security threats/ NTS*) merupakan tantangan untuk mencapai kelangsungan hidup dari individu atau negara yang muncul dari sumber non-militer seperti perubahan iklim, keterbatasan sumberdaya, wabah penyakit, bencana alam, migrasi irregular, keterbatasan pangan, penyelundupan orang atau narkoba, hingga kejahatan transnasional. Ancaman non-tradisional yang sering

⁹ Fulvio Attinà, "Traditional Security Issues dalam Wang J., Song W. (eds), *China, the European Union, and the International Politics of Global Governance*, (New York: Palgrave Macmillan, 2016)

terjadi dalam lingkup transnasional, tidak bisa diselesaikan secara sepihak, dan membutuhkan tanggapan komprehensif secara politik, ekonomi, dan sosial, serta penggunaan kekuatan militer untuk masalah kemanusiaan¹⁰.

Munculnya aktor *non-state* seperti teroris, kartel narkoba, jaringan perompak, atau konflik saudara menandakan dimulainya era baru akan ancaman non-tradisional bagi berbagai negara saat ini. Selain keberadaan aktor *non-state* dan transnasional, munculnya ancaman kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim dilihat sebagai isu global yang berdampak serius terhadap keamanan nasional suatu negara¹¹. Meningkatnya populasi berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi. Hal ini menyebabkan berkurangnya sumber daya alam secara drastis, lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menggantinya di berbagai negara maju dan berkembang. Hal ini menyebabkan isu perubahan iklim memiliki posisi penting dalam keamanan global, terutama dampaknya terhadap produksi agrikultur. Keterbatasan pangan akibat perubahan iklim merupakan isu krusial yang akan dihadapi berbagai negara di masa depan, terutama bagi negara berkembang yang memiliki jumlah populasi tinggi.¹²

¹⁰ Mely Caballero-Anthony (ed), *An Introduction to Non-Traditional Security Studies – A Transnational Approach*, (London: SAGE Publications, 2016)

¹¹ Divya Srikanth, “Non-Traditional Security Threats in the 21st Century: A Review”, *International Journal of Development and Conflict*, Vol. 4, 2014, hlm. 60-68.

¹² *Ibid.*

Krisis Pangan

Krisis pangan merupakan salah satu ancaman non-tradisional akibat dampak dari perubahan iklim. Menurut FAO (2018), perubahan iklim memiliki dampak negatif terhadap 4 pilar dari keamanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses, pemanfaatan, stabilitas—dan interaksinya.¹³ Perubahan iklim berdampak langsung terhadap sistem pangan, keamanan pangan, dan mitigasi sehingga berpotensi meningkatkan kompetisi pada kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan agrikultur¹⁴. Pertumbuhan produktivitas pesat di sektor agrikultur sejak tahun 1976 telah menopang sistem pangan global saat ini yang menjadi pendorong utama masalah perubahan iklim. Pada tahun 2018, FAO memperkirakan adanya tuntutan untuk memproduksi 50% lebih banyak makanan untuk mengimbangi kebutuhan populasi yang meningkat di tahun 2050.¹⁵

Menurut FAO, krisis pangan atau *food insecurity* merupakan kurangnya akses yang aman terhadap kecukupan jumlah makanan yang aman dan bergizi untuk pertumbuhan manusia normal serta perkembangan hidup aktif dan sehat.¹⁶ Gundersen dan Ziliak (2015) mendefinisikan *food insecurity* sebagai terbatasnya ketersediaan makanan sehat dan bernutrisi atau ketidakmampuan

¹³ Cheikh Mbow, dkk, “Food Security dalam ‘Climate Change and Land: an IPCC Special Report on Climate Change, Desertification—’”, dalam <https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/>, IPCC, 2019, diakses pada 26 November 2020.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Cheikh Mbow, dkk, *op. cit.*

¹⁶ FAO Reports, *op.cit.*, hlm. 2-11.

untuk mendapatkan makanan¹⁷. Krisis pangan juga berpotensi menimbulkan fenomena malnutrisi pada orang dewasa dan anak. Menurut Scrimshaw (1968), malnutrisi terjadi akibat hubungan kompleks terhadap kelaparan yang dipengaruhi oleh variabel lain seperti status kesehatan, pengeluaran energi, tingkat pendidikan, infrastruktur komunitas, serta asupan mikronutrien.¹⁸ Kendati demikian, malnutrisi bukanlah konsekuensi utama dari krisis pangan namun sangat memungkinkan terjadi.¹⁹

Berdasarkan hal ini, krisis pangan merupakan suatu fenomena ancaman non-tradisional yang berpotensi menyerang dunia secara global. Adanya urgensi bagi setiap negara untuk mempersiapkan langkah preventif untuk menghadapi ancaman krisis pangan di tengah situasi global yang tidak menentu. Hal ini mengingatkan, meskipun prediksi tentang keterbatasan pangan belum terjadi, hal tersebut tidak dapat dikesampingkan di masa depan seiring dengan meningkatnya jumlah populasi. Meningkatnya jumlah populasi yang pesat akan menambah tekanan pada ketersediaan sumber daya lahan yang sudah terbatas.²⁰ Selain itu, potensi ancaman lainnya adalah kedatangan massal para pengungsi atau *asylum*

seekers dari negara terdampak karena rusaknya lingkungan yang menyebabkan kelangkaan pangan atau air. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan baru berupa ketidakstabilan di negara penerima atau *host*. Pada akhirnya, perlindungan terhadap lingkungan merupakan permasalahan kritis serta isu global yang terkait dengan ancaman dan keamanan negara. Lingkungan yang tidak stabil berpotensi mengarah ke titik kritis sehingga konsekuensi bencana yang ditimbulkan baik dari alam atau manusia dapat mengancam kelangsungan negara itu sendiri.²¹

Keamanan Pangan (*Food Security*)

Ketika melihat ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi pandemi, hal tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara karena merupakan isu transnasional sehingga melewati batas kedaulatan negara. Disamping diperlukannya langkah bersama dalam masyarakat internasional untuk menghadapi permasalahan ini, pemerintah suatu negara juga harus mengambil kebijakan preventif tersendiri untuk menjaga keamanan pangan nasionalnya, termasuk Indonesia.

Keamanan pangan atau *food security* adalah kemudahan akses berbagai individu terhadap kecukupan makanan untuk memberikan energi serta nutrisi yang dibutuhkan agar hidup aktif dan sehat.²² Keamanan Pangan mulai

¹⁷ Nancy T. Browne, "Food Insecurity: Assessment and Intervention", *Journal of Pediatric Surgical Nursing*, Vol. 6, No. 1, 2017.

¹⁸ Christopher B. Barrett, "Food Security and Food Assistance Programs", dalam B. Gardner dan G. Rausser (ed.), *Handbook of Agricultural Economics*, (Amsterdam: Elsevier, 2002), hlm. 5.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Divya Srikanth, *op. cit.*, hlm. 60-68.

²¹ *Ibid.*

²² Christopher B. Barrett, *op. cit.* hlm. 5.

memperoleh perhatian ketika kerawanan pangan terjadi. Menurut Sandjaja (2009), kerawanan pangan adalah situasi di daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat.²³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 1 butir 3 tentang menjelaskan Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, yakni dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.²⁴ Sedangkan menurut FAO, ketahanan atau keamanan pangan diartikan sebagai kondisi yang mana setiap orang sepanjang waktu, secara fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai preferensinya.²⁵ Keamanan pangan diartikan sebagai kecukupan makanan, namun tidak berarti terlepas dari fenomena kelaparan. Keamanan pangan diartikan

²³ Dodik Briawan, Purwiyatno Hariyadi, Eko Hari Purnomo dan Fahim M Taqi, "Protokol Penanggulangan dan Penyelamatan Krisis Pangan dan Gizi pada Kelompok Rawan", *Pangan*, Vol. 24, No. 2, 2015, hlm. 153.

²⁴ BULOG, "Ketahanan Pangan", dalam <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>, 2018, diakses pada 18 September 2020.

²⁵ *Ibid.*

sebagai kondisi berkecukupan untuk mendapatkan nutrisi yang memadai.²⁶

Pada penelitian sebelumnya antara tahun 1997-1999, performa Indonesia dalam mengatasi masalah gizi buruk relatif baik diantara negara-negara lainnya di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang cukup tinggi²⁷. Dari 99 negara berkembang, Indonesia merupakan negara ketiga terbaik yang mampu menekan jumlah gizi buruk antara tahun 1990-1992 dan 1997-1999.²⁸ Kendati demikian, Indonesia merupakan rumah bagi 250 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,49%, meskipun berbeda di setiap provinsinya.²⁹ Perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi menyebabkan adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dalam negeri ditengah kondisi pandemi.

Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara yang berusaha memenuhi kebutuhan pangannya. Usaha Indonesia dalam memenuhi ketahanan pangannya diwujudkan dalam beberapa cara, salah satunya adalah program subsidi yang bertujuan untuk melindungi petani serta swasembada pangan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan serta UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia berusaha untuk

²⁶ *Ibid.*

²⁷ FAO, "Indonesia", dalam <http://www.fao.org/3/y4632e/y4632e01.htm>, diakses pada 26 November 2020.

²⁸ FAO, "Indonesia", *loc. cit.*

²⁹ FAO, "Indonesia at a Glance", dalam <http://www.fao.org/indonesia/fao-in-indonesia/indonesia-at-a-glance/en/>, diakses pada 26 November 2020.

melindungi mata pencaharian petani dengan mengutamakan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta melarang impor suatu komoditas yang dianggap cukup oleh pemerintah. Subsidi kepada petani ini juga diwujudkan dengan pemberian benih dan pupuk³⁰.

Melihat realitas sekarang ini, dunia sedang menghadapi pandemi Corona (Covid-19), yang berdampak terhadap sektor ekonomi. Kondisi ekonomi dalam situasi pandemi ini menyebabkan kemiskinan meningkat, karena itulah keamanan pangan menjadi perhatian pemerintah. Melalui *video conference* dalam rapat terbatas pada Rabu 23 September 2020, Presiden Jokowi mempertegas pentingnya pembangunan lumbung pangan atau *food estate* untuk mengantisipasi krisis pangan di tengah pandemi Covid-19. Mengupayakan membangun *food estate* didasari tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pangan nasional sehingga dapat menjadi cadangan dan penyimpanan pangan serta distribusi pangan dalam menghadapi krisis akibat pandemi. Sementara itu, *food estate* ini juga mengupayakan peningkatan produksi pangan sehingga mengurangi impor komoditas bahan pangan.³¹

³⁰ Arianto A. Patunru & Hizkia Respatiadi, *Protecting the Farmers: Improving the Quality of Social Protection Schemes for Agricultural Workers in Indonesia*, (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2017).

³¹ Jazila Nailatunni'mah, "'Master Plan' Presiden Jokowi Untuk Lumbung Pangan Nasional", dalam <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15766059/master-plan-presiden-jokowi-untuk-lumbung-pangan-nasional>, 23 September 2020, diakses pada 19 Oktober 2020.

Disamping itu, rencana pembangunan *food estate* terungkap dari keinginan Presiden Jokowi, yakni untuk mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang sudah seringkali dingatkan oleh FAO dan untuk mengantisipasi perubahan iklim serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Jadi faktor pendirian *food estate* disebabkan oleh Covid-19, krisis pangan, dan perubahan iklim. Ketiga hal ini yang menjadi fondasi dari pembangunan *food estate*.

Food Estate

Lumbung pangan nasional atau *food estate* merupakan proyek pengembangan pangan yang dilakukan dibawah Kementerian Pertanian (Kementan) dengan pelibatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Proyek ini dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. *Food Estate* adalah suatu konsep untuk pengembangan pangan yang dilaksanakan secara integritas meliputi pertanian dan/atau perkebunan di suatu wilayah.³²

Realisasi *food estate* dilakukan di area rawa yang dinilai sudah mulai berproduksi namun hasilnya masih rendah. Terdapat beberapa sektor yang akan diperbaiki oleh Mentan Syahrul Yasin Limpo yaitu sarana dan prasarana pertanian, penggunaan bibit unggul dan pupuk yang sesuai, serta

³² *Ibid.*

obat-obatan tanaman.³³ Lebih lanjut, program *food estate* akan melibatkan teknologi modern dan digital serta diharapkan menyerap tenaga kerja dan arus migrasi yang besar ke Kalimantan Tengah. Pengembangan *food estate* dilaksanakan dengan menggunakan lahan 190 ribu hektar di Kalimantan Tengah, 120 ribu hektar di Kalimantan Barat, 10 ribu hektar di Kalimantan Timur, 190 ribu hektar di Maluku, dan 1,9 juta hektar di Papua.³⁴ Menhan Prabowo menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada 4 negara yang tertarik sebagai investor yaitu Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Qatar. Hal ini dapat dilihat sebagai potensi kerja sama luar negeri di sektor pangan dan teknologi. Dalam perkembangannya, Menhan Prabowo juga menjelaskan bahwa akan ada dua fokus penanaman yaitu beras yang dilakukan Kemhan dan singkong oleh Kemhan di awal tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek *food estate* merupakan program pemerintah yang berusaha mengintegrasikan kegiatan pertanian, peternakan, hingga perkebunan di satu wilayah. Proyek *food estate* masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dengan payung hukum Perpres No. 58 Tahun 2018. PSN diartikan sebagai program pembangunan infrastruktur strategis pada masa pemerintahan Jokowi dengan total usulan 89 proyek baru senilai Rp 1,422 triliun.³⁵ *Food estate* memakan porsi

³³ Jazila Nailatunni'mah, *loc. cit.*

³⁴ Alfin Febrian & Fadhil Haidar Sulaeman, *op. cit.*, hlm. 28-42.

³⁵ Rakhmat Nur Hakim, "Pemerintah

yang cukup besar dari anggaran PSN, setidaknya pemerintah mengalokasikan Rp104,2 triliun pada tahun 2021 untuk sektor keamanan pangan, termasuk pembangunan *food estate*.³⁶ Anggaran ini ditujukan untuk sektor ketahanan pangan khususnya dalam pembangunan sarana dan teknologi serta revitalisasi sistem pangan nasional³⁷.

Food estate akan mengembangkan lahan alluvial seluas 165.000 ha untuk penanaman padi dan 60.000 ha untuk penanaman singkong. Proses ini dilakukan secara bertahap diawali dengan penanaman padi sebesar 32.000 ha, perbaikan aksesibilitas menuju kawasan, serta perbaikan saluran irigasi pada Oktober 2020. Keseluruhan proses tahap awal ini ditargetkan rampung di tahun 2021 sehingga bisa dilakukan proses penanaman penuh tahun 2021³⁸. Mentan optimis produktivitas padi di kawasan *food estate* bisa mencapai 4-5 ton per ha³⁹.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia

Rekomendasikan 89 Proyek Baru Senilai Rp1.422 Triliun", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/29/15053551/pemerintah-rekomendasikan-89-proyek-strategis-nasional-baru-senilai-rp-1422>, 29 Mei 2020, diakses pada 26 November 2020.

³⁶ CNN Indonesia, "Food Estate, Jalan Jokowi Kenyangkan Rakyat Indonesia", dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201020094038-92-560361/food-estate-jalan-jokowi-kenyangkan-rakyat-indonesia>, 20 Oktober 2020, diakses pada 23 November 2020.

³⁷ Rakhmat Nur Hakim, *op. cit.*

³⁸ Sekretariat Kabinet Indonesia, "Menteri PUPR Targetkan Pengembangan Food Estate di Kalteng Mulai Oktober 2020", dalam <https://setkab.go.id/menteri-pupr-targetkan-pengembangan-food-estate-di-kalteng-dimulai-oktober-2020/>, 2 September 2020, diakses pada 26 November 2020.

³⁹ Rakhmat Nur Hakim, *op. cit.*

merespons adanya ancaman krisis pangan pasca kondisi pandemi Covid-19 dengan melakukan pembangunan lumbung pangan nasional atau *food estate*. Indonesia mengambil kebijakan yang preventif guna menghadapi ancaman krisis pangan dan mengakui bahwa krisis pangan merupakan ancaman nasional yang nyata sehingga dibutuhkan sinergi antara kementerian vital terkait yaitu Kementan, Kemhan, dan KemenPUPR. Pembangunan lumbung pangan atau *food estate* ditujukan untuk mengintegrasikan sektor-sektor pangan nasional yang terdiri dari pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kalimantan Tengah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital serta prinsip keberlanjutan. Indonesia melihat ancaman krisis pangan sebagai suatu fenomena yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai negara agraris besar dengan jumlah penduduk yang tinggi, ketahanan pangan merupakan prioritas pemerintah kepada rakyatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 1 butir 3 yang menjelaskan Ketahanan Pangan.

Pembangunan konsep lumbung pangan nasional atau *food estate* sebenarnya sudah beberapa kali dicanangkan oleh Indonesia dalam beberapa periode terakhir. Seperti halnya Mega Rice Project (MRP) di zaman Soeharto, Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) di zaman SBY, hingga (Merauke Kawasan Ekonomi Khusus/ Merauke KEK) di zaman Jokowi I. Namun, mayoritas proyek ini tersendat bahkan dihapuskan

dari Program Strategis Nasional. Beberapa faktor penyebab beragam, mulai dari perencanaan yang kurang matang, dana yang besar, hingga implementasi dan hasil *output* yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan sehingga dinilai merugikan.

Food estate merupakan suatu daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Adapun, lumbung pangan baru ini juga menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 hingga 2024. Hasil produksi pangan yang dihasilkan dari *food estate* ini diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar internasional.⁴⁰ Ketika melihat konsep lumbung pangan, hal itu lebih ditujukan pada bentuk penyimpanan cadangan pangan untuk digunakan dalam kondisi darurat. Dalam lumbung pangan di tingkat komunitas masyarakat, penyimpanan cadangan makanan dilakukan untuk menghadapi ancaman kekeringan dan bencana alam. Keefektifan sistem lumbung pangan seringkali mulai diintervensi pemerintah melalui BULOG dan kebijakan pangan murah lainnya⁴¹. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan konsep *food estate* sebagai sistem

⁴⁰ Vina Fadhotul Mukaromah, "Menilik Proyek Food Estate di Indonesia yang Disebut Jokowi dalam Pidato Kenegaraan", dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/14/200300265/menilik-proyek-food-estate-di-indonesia-yang-disebut-jokowi-dalam-pidato?page=all>, 14 Agustus 2020, diakses pada 19 Oktober 2020.

⁴¹ Erlyna Wida Riptanti, dkk, "The Development of Sustainable Community Food Barn in Wonogiri Regency", *The Asian Journal of Applied Sciences*, Vol. 05, 2017.

penanaman produk pangan terintegrasi di satu kawasan yang diekspektasikan dapat memenuhi kebutuhan serta ketahanan pangan nasional serta menyimpan cadangannya dalam lumbung pangan untuk keadaan darurat hingga kebutuhan ekspor.

Pada Juli 2020 lalu, *The World Food Programme* (WFP) merilis laporan bahwa setidaknya ada 25 negara yang terancam mengalami permasalahan kelaparan serius dalam beberapa bulan akibat pandemi.. WFP memprediksi setidaknya 130 juta orang akan menghadapi kelaparan akut karena krisis.⁴² Sebarannya didominasi di negara-negara Afrika, Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, dan Asia, terutama bagi negara berkembang karena sulitnya akses masyarakat terhadap bahan makanan yang cukup dan bernutrisi. Berdasarkan kondisi tersebut, keamanan pangan yang ingin dicapai beberapa negara tersebut sulit karena tidak memenuhi kriteria keamanan pangan kemudahan akses oleh masyarakat. Selain itu, perubahan iklim turut mempengaruhi ketersediaan pangan secara fisik yang kondisinya berubah setiap saat.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menjamin adanya ketersediaan pangan bagi segenap rakyatnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di tahun 2018 setara dengan 33,94 juta

⁴² UN WFP, "New Report Shows Hunger is due to soar as Coronavirus Obliterates Lives and Livelihoods", dalam <https://www.wfp.org/news/new-report-shows-hunger-due-soar-coronavirus-obliterated-lives-and-livelihoods>, 17 Juli 2020, diakses pada 26 November 2020.

ton beras sementara tahun 2019 menurun sebesar 31,31 juta ton. Hal itu diartikan adanya penurunan sebesar 2,63 juta ton atau sekitar 7,75% dibandingkan tahun 2018.⁴³ Sedangkan jumlah konsumsi beras nasional diperkirakan mencapai 29,57 juta ton beras sehingga surplus sekitar 2,85 juta ton di tahun 2018⁴⁴. Kementerian Pertanian juga mengharapkan adanya surplus beras di bulan Desember 2020 sebesar 7,45 juta ton⁴⁵. Surplus beras tahun 2020 disebabkan karena adanya limpahan sisa pasokan di tahun 2019 sebesar 5,9 juta ton beras dan keseluruhan hasil musim tanam periode I dan II tahun 2020.⁴⁶ Total konsumsi beras 2020 mencapai 30,08 juta ton sehingga diharapkan masih memiliki cadangan beras sebesar 7,45 juta ton.⁴⁷

Berdasarkan data tersebut, dapat diindikasikan bahwa cadangan pangan Indonesia tahun ini cukup stabil dari ancaman krisis. Kendati demikian, Indonesia belum mampu melepaskan ketergantungannya pada sektor impor untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam komoditas seperti beras padahal pemerintah sudah menjamin larangan impor pada suatu komoditi agrikultur

⁴³ Badan Pusat Statistik, *Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia*, (Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 16.

⁴⁴ Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, "Cadangan Pangan", dalam <http://bkp.pertanian.go.id/cadangan-pangan>, diakses pada 23 November 2020.

⁴⁵ Yohana Artha Uly, "Mentan Yakin Stok Beras Akhir Tahun Surplus 7.45 Juta ton", dalam <https://money.kompas.com/read/2020/10/26/175440926/mentan-yakin-stok-beras-akhir-tahun-surplus-745-juta-ton?page=all>, 26 Oktober 2020, diakses pada 26 November 2020.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

ketika pasokannya memenuhi kebutuhan domestik, seperti tertuang dalam UU 19 No. 13 Pasal 30.

Beras merupakan salah satu komoditi yang diunggulkan dalam *food estate* dan merupakan bahan pokok yang utama bagi masyarakat Indonesia. Dalam mengatasi ketergantungannya terhadap beras dan memenuhi jumlah permintaan, pemerintah melakukan beberapa langkah, yakni meningkatkan produksi padi di seluruh wilayah melalui program swasembada serta menggalakan program diversifikasi pangan, yaitu mencari sumber pangan lain selain padi yang berpotensi dijadikan bahan pokok pengganti. Langkah pemerintah ini membuahkan hasil dengan meningkatnya surplus padi tahun 2015-2017 sebesar 81,38 juta ton yang naik 14,9% menjadi 79,35 juta ton di tahun 2017⁴⁸.

Data menunjukkan bahwa produksi beras nasional Indonesia berada di angka yang cukup stabil, bahkan surplus dalam beberapa tahun terakhir. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kemudahan akses terhadap pangan sehingga menunjukkan kurangnya prioritas terhadap distribusi pangan. Hal inilah yang juga menyebabkan ketidakstabilan harga antara Indonesia bagian timur dan barat ⁴⁹. Berdasarkan

⁴⁸ Lusya Handayani & Munawar K. Nahrawi, "Bela Negara Melalui Kampanye Pangan Lokal di Media Internet", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 2018, Vol. 8, No. 2.

⁴⁹ Effendi Andoko & Aurellia Candida Doretha, "Analysis of Indonesian Government Strategies to Food Security: Harnessing the Potential of Natural and Human Resources", dalam <https://ap.ffa.org.tw/article/1588>, 20 September 2019, diakses pada 23 November 2020.

hal itu, cadangan pangan Indonesia terutama komoditi beras cukup stabil berkat program dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah potensi bergesernya fokus pencaharian masyarakat dari agrikultur ke non-agrikultur. Sulitnya kehidupan di wilayah pedesaan membuat generasi muda lebih memilih bekerja di pabrik daripada bertani atau mencari kesempatan lainnya di kota besar. Permasalahan ini menyebabkan populasi penduduk di wilayah perkotaan meningkat pesat, sekitar 50% di tahun 2010 dan 54% di tahun 2015. Setidaknya hampir 16 juta atau lebih dari 60% kepala rumah tangga petani berumur antara 45 hingga di atas 60 tahun. Jumlah populasi petani di pedesaan yang menua akan turut memengaruhi kemampuan fisik, kurangnya inovasi, serta visi strategis.⁵⁰

Berdasarkan penjabaran di atas, Indonesia memiliki kebijakan domestik yang bersifat preventif dalam menghadapi krisis pangan dengan membangun proyek *food estate* dan masuk dalam anggaran PSN 2020-2024. Menurut Kwasek⁵¹, keamanan pangan suatu negara dapat tercapai ketika dipenuhinya:

1. Ketersediaan pangan secara fisik.
2. Ketersediaan ekonomi pangan.
3. Nilai kesehatan dari produk pangan.

⁵⁰ Arianto A. Patunru & Hizkia Respatiadi, *op. cit.*

⁵¹ Mariola Kwasek, "Threats to Food Security and Common Agricultural Policy", *Economics of Agriculture*, Vol. 59, No.4, 2012, hlm. 702.

Program *food estate* dinilai bertujuan untuk mewujudkan ketiga poin dalam mencapai keamanan pangan nasional. Sebab proyek ini diekspektasikan akan menghasilkan cadangan pangan yang besar dan bergizi secara nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik ketika menghadapi kondisi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih aman dari ancaman krisis, namun, kondisinya dapat berubah jika menghadapi situasi pandemi, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi dalam bentuk pembangunan *food estate*.

Kesimpulan

Krisis pangan merupakan salah satu ancaman non-tradisional, karena merupakan dampak dari perubahan iklim yang dirasakan masyarakat global. Krisis pangan merupakan ancaman seiring dengan rusaknya lingkungan akibat bertambahnya jumlah populasi. Sehingga terdapat tekanan akan kebutuhan sumber daya yang besar ditengah ketersediaannya yang semakin menipis, serta dibutuhkan keberadaan pangan yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi setiap saat. Kondisi ini juga turut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memengaruhi kehidupan manusia dan menyebabkan kemunduran di berbagai sektor. Berdasarkan hal tersebut, berbagai negara di dunia terancam mengalami krisis pangan bahkan beberapa diantaranya berada di tingkat serius atau akut. Dibutuhkan suatu komitmen dalam masyarakat

internasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global dalam beberapa tahun ke depan terutama dalam kondisi pasca pandemi. Kendati demikian, negara harus memiliki langkah preventif tersendiri dalam menghadapi ancaman ini sebagai bagian dari usaha pertahanan keamanan nasional. Dalam hal ini, ancaman krisis pangan, berdasarkan peringatan dari FAO direspons oleh Indonesia dengan melaksanakan pembangunan lumbung pangan nasional atau *food estate* di Kalimantan Tengah.

Langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi ini di tengah situasi pandemi Covid-19, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menempati prioritas pemerintah serta menghadapi kondisi darurat akan ancaman krisis pangan. Sebagai pemangku kekuasaan, semestinya pemerintah menjamin keamanan dan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya. Respons cepat pemerintah ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan merupakan sektor vital yang selayaknya diperhatikan keberlanjutannya. Hal ini mengingatkan, meskipun ketahanan pangan Indonesia masih stabil, potensi terjadinya krisis pangan di masa yang akan datang tidak bisa dikesampingkan, sehingga negara harus siap menghadapi krisis pangan akut yang dapat terjadi 50 tahun mendatang. Mengupayakan membangun *food estate* didasari tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pangan nasional sehingga dapat menjadi cadangan dan penyimpanan pangan serta distribusi pangan dalam menghadapi krisis akibat

pandemi. Sementara itu, *food estate* ini juga mengupayakan peningkatan produksi pangan sehingga mengurangi impor komoditas bahan pangan.

Keberadaan *food estate* sebagai respons pemerintah tentunya tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu singkat. Proyek *food estate* merupakan program untuk tujuan jangka panjang yang turut memerhatikan aspek keberlanjutan. Setiap negara memiliki pola adaptasi tersendiri dalam menghadapi ancaman krisis. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara produsen pangan yang besar di dunia. Seluruh program agrikultur yang dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya memiliki *output* yang hampir sama yaitu mencapai ketahanan pangan nasional. Kendati demikian, proyek besar memiliki tanggung jawab yang besar pula kepada rakyat. Masih terdapat peluang bahwa proyek *food estate* akan diubah atau ditinggalkan seperti proyek-proyek terdahulu. Hal ini disebabkan karena minimnya perencanaan serta pengaruh faktor eksternal dan internal lain seperti perubahan kondisi ekonomi akibat resesi atau kondisi lainnya. Sementara itu, aspek keberlanjutan dan penggunaan teknologi dinilai merupakan tantangan terbesar untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam *food estate* itu sendiri. Hal ini dikarenakan menjaga kelangsungan suatu kebijakan memerlukan keseriusan pemerintah dan rakyat yang saling bersinergi.

Daftar Pustaka

Buku

- Attinà, Fulvio. 2016. "Traditional Security Issues", dalam Wang J., Song W. (eds). *China, the European Union, and the International Politics of Global Governance*. New York: Palgrave Macmillan.
- Barrett, Christopher B. 2002. Food Security and Food Assistance Programs. *Handbook of Agricultural Economics*. Dalam B. Gardner & G. Rausser (ed.). *Handbook of Agricultural Economics*. Elsevier.
- Caballero-Anthony, Mely. (ed). 2016. *An Introduction to Non-Traditional Security Studies – A Transnational Approach*. London: SAGE Publications.

Jurnal

- Briawan, Dodik dkk. 2015. "Protokol Penanggulangan dan Penyelamatan Krisis Pangan dan Gizi pada Kelompok Rawan". *Pangan*. Vol. 4. No. 2. Juni.
- Browne, Nancy T. 2017. "Food Insecurity: Assessment and Intervention". *Journal of Pediatric Surgical Nursing*. Vol. 6. No. 1.
- Febrian, Alfin & Sulaeman, Fadhil Haidar. 2020. "Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Lemhannas*. Vol. 8. No.2.
- Handayani, Lusia & Nahrawi, Munawar K. 2018. "Bela Negara Melalui Kampanye Pangan Lokal di Media Internet". *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol. 8. No. 2.
- Kwasek, Mariola. 2012. "Threats to Food Security and Common Agricultural Policy". *Economics of Agriculture*. Vol. 59. No. 4.
- Mohajan, Haradhan Kumar. "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects". *Journal of Economic Development: Environment and People*. Vol. 7. Iss. 01. 2018.

Riptanti, Erlina Wida., dkk. 2017. "The Development of Sustainable Community Food Barn in Wonogiri Regency". *The Asian Journal of Applied Sciences*. Vol. 05.

Srikanth, Divya. 2014. "Non-Traditional Security Threats in the 21st Century: A Review". *International Journal of Development and Conflict*. Vol. 4.

Laporan

Barichello, Richard, & Patunru, Arianto. 2009. *Agriculture in Indonesia: Lagging Performance and Difficult Choices*. Agricultural & Applied Economics Associations.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

Cheikh Mbow, dkk. 2019. *Food Security*. Dalam *Climate Change and Land: an IPCC Special Report on Climate Change, Desertification—and Green House Fluxes in Terrestrial Ecosystem*. dalam <https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/>. IPCC. Chapter 5.

FAO Reports. 2020. *Global Report on Food Crises*. New York: Food Security Information Network. Patunru, Arianto A. & Respatiadi, Hizkia. 2017. *Protecting the Farmers: Improving the Quality of Social Protection Schemes for Agricultural Workers in Indonesia*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.

Website

Andoko, Effendi & Doretha, Aurellia Candida. "Analysis of Indonesian Government Strategies to Food Security: Harnessing the Potential of Natural and Human Resources", dalam <https://ap.ffc.org.tw/article/1588>, 20 September 2019, diakses pada 23 November 2020.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, "Cadangan Pangan", dalam <http://bkp.pertanian.go.id/cadangan-pangan>, diakses pada 23 November 2020.

BULOG, "Ketahanan Pangan", dalam <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>, 2018, diakses pada 18 September 2020.

CNN Indonesia, "Food Estate, Jalan Jokowi Kenyangkan Rakyat Indonesia", dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201020094038-92-560361/food-estate-jalan-jokowi-kenyangkan-rakyat-indonesia>, 20 Oktober 2020, diakses pada 23 November 2020.

FAO, "Indonesia", dalam <http://www.fao.org/3/y4632e/y4632eol.htm>, diakses pada 26 November 2020.

FAO, "Indonesia at a Glance", dalam <http://www.fao.org/indonesia/fao-in-indonesia/indonesia-at-a-glance/en/>, diakses pada 26 November 2020.

Hakim, Rakhmat Nur, "Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Baru Senilai Rp1.422 Triliun", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/29/15053551/pemerintah-rekomendasikan-89-proyek-strategis-nasional-baru-senilai-rp-1422>, 29 Mei 2020, diakses pada 26 November 2020.

Harvey, Fiona, "World faces worst food crisis for at least 50 years: UN warns", dalam <https://www.theguardian.com/society/2020/jun/09/world-faces-worst-food-crisis-50-years-un-coronavirus>, 9 Juni 2020, diakses pada 16 September 2020.

Mukaromah, Vina Fadhotul, "Menilik Proyek Food Estate di Indonesia yang Disebut Jokowi dalam Pidato Kenegaraan", dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/14/200300265/menilik-proyek-food-estate-di-indonesia-yang-disebut-jokowi-dalam-pidato?page=all>, 14 Agustus 2020, diakses pada 19 Oktober 2020.

Nailatunni'mah, Jazila, "'Master Plan' Presiden Jokowi Untuk Lumbung Pangan Nasional," dalam <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15766059/master-plan-presiden-jokowi-untuk-lumbung-pangan-nasional>, 23 September 2020, diakses pada 19 Oktober 2020.

Rahman, Dzulfiqar Fathur, “Indonesia to develop food barns to secure rice stocks”, dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/16/govt-to-develop-food-barns-facilitate-collaboration-to-secure-rice-stocks.html>, dalam 16 November 2020, diakses pada 23 November 2020.

Sekretariat Kabinet Indonesia, “Menteri PUPR Targetkan Pengembangan Food Estate di Kalteng Mulai Oktober 2020”, dalam <https://setkab.go.id/menteri-pupr-targetkan-pengembangan-food-estate-di-kalteng-dimulai-oktober-2020/>, 2 September 2020, diakses pada 26 November 2020.

Uly, Yohana Artha, “Mentan Yakin Stok Beras Akhir Tahun Surplus 7.45 Juta ton”, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/10/26/175440926/mentan-yakin-stok-beras-akhir-tahun-surplus-745-juta-ton?page=all>, 26 Oktober 2020, diakses pada 26 November 2020.

UN WFP, “New Report Shows Hunger is due to soar as Coronavirus Obliterates Lives and Livelihoods”, dalam <https://www.wfp.org/news/new-report-shows-hunger-due-soar-coronavirus-obliterates-lives-and-livelihoods>, 17 Juli 2020, diakses pada 26 November 2020.